BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi keuangan dari perspektif pengelola dan jemaat Gereja HKBP Bandung, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemaknaan akuntabilitas keuangan Gereja HKBP Bandung diarahkan pada bentuk akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal dimaknai oleh pengelola bahwa pelayanan di Gereja merupakan hubungan pertanggungjawaban secara pribadi dengan Tuhan, dengan dasar pelayanan "Takut akan Tuhan" dan nilai-nilai kekristenan di dalam Alkitab. Akuntabilitas horizontal dimaknai sebagai pertanggungjawaban kepada jemaat melalui laporan keuangan yang disajikan pada Warta Jemaat setiap minggunya. Paham ini sesuai teori *stewardship* bahwa jemaat sebagai *principal* dan pengelola gereja sebagai *steward*. Karena itu, pelayanan dalam pengelolaan keuangan didasarkan pada kepentingan dan tujuan organisasi, bukan kepentingan pribadi pengelola. Jemaat memahami akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban yang harus diberikan pengelola gereja sebagai pengguna sumber daya dan adanya akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan jemaat terhadap pengelola gereja. Jemaat menilai bahwa akuntabilitas keuangan Gereja HKBP Bandung sudah baik termasuk karena adanya keterlibatan jemaat dalam pengambilan keputusan gereja seperti melalui rapat, namun terdapat hal-hal yang dapat ditingkatkan seperti mengungkapkan dan mencatat aset atau harta gereja serta membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku yaitu ISAK 35. Secara keseluruhan gereja telah menjalankan pengelolaannya sesuai indikator akuntabilitas menurut Solihin yakni prosedur pelaksanaan sesuai dengan pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, dan adanya output atau *outcome* yang terukur.

Joe Putra Pratama Pardede, 2022
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN: PERSPEKTIF PENGELOLA DAN JEMAAT GEREJA HKBP BANDUNG
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Pengelola menyatakan transparansi sebagai suatu hal yang penting dilakukan di gereja dengan memaknai transparansi sebagai keterbukaan atas seluruh informasi keuangan gereja, yang atas pencatatan informasi keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya transparansi keuangan, pengelola gereja mengharapkan kepercayaan jemaat kepada gereja. Transparansi dilakukan dalam bentuk pemberian laporan keuangan kepada jemaat melalui Warta Jemaat yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui *scan* pada *barcode* yang telah disediakan gereja. Jemaat mengungkapkan bahwa transparansi merupakan hal yang perlu disampaikan oleh pengelola agar jemaat mengetahui penggunaan keuangan dan menumbuhkan kepercayaannya terhadap pengelola keuangan gereja. Transparansi yang dilakukan dapat pula menjadi bahan evaluasi apakah penggunaan dana telah dilakukan dengan baik. Namun, transparansi bukan merupakan hal yang mutlak dalam memberikan persembahan karena jemaat meyakini bahwa memberikan persembahan dilakukan atas dasar iman kepada Tuhan tanpa harus memikirkan penggunaan dananya. Mengacu pada prinsip transparansi yang dirumuskan Humanitarian Forum Indonesia Indonesia, Gereja HKBP Bandung telah memenuhi lima dari enam prinsip tersebut yaitu adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan, adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya, laporan tahunan, dan pedoman dalam penyebaran informasi. Prinsip yang belum terpenuhi yaitu website sebagai media publikasi organisasi. Namun demikian, jemaat sudah merasa puas dengan transparansi keuangan yang dilakukan gereja karena seluruh penggunaan dana secara jelas disampaikan kepada jemaat melalui laporan keuangan yang disajikan pengelola.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan mengenai akuntabilitas dan transparansi keuangan dari perspektif pengelola dan jemaat Gereja HKBP Bandung, penelitian ini telah dilakukan sesuai prosedur ilmiah. Namun dalam penelitian ini terdapat keterbatasan seperti jemaat yang menjadi informan berasal

dari kategori jemaat *parompuan* (ibu) dan *naposobulung* (pemuda) saja sedangkan terdapat kategori jemaat lainnya seperti *ama* (bapak), lansia, dan remaja. Selain itu pemilihan jemaat sebagai informan dalam penelitian ini dilakukan tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan atau pekerjaan jemaat.

5.3 Saran

Bagi pengelola Gereja HKBP Bandung, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran mengenai akuntabilitas dan transparansi keuangan dari perspektif pengelola dan jemaat, serta menjadi referensi bagi pengelola gereja untuk memaksimalkan praktik akuntabilitas dan transparansi yang dijalankan agar tetap sesuai dengan harapan jemaat. Hal yang dapat ditingkatkan adalah penyajian laporan keuangan sesuai pedoman yang berlaku yaitu ISAK No. 35 yang di dalamnya terdapat informasi-informasi keuangan yang lebih lengkap termasuk pengungkapan nilai harta non kas gereja. Pengelola dapat membuat dan mengelola website gereja sebagai media publikasi agar penginformasian kegiatan gereja dapat diakses lebih luas. Selain itu, pengelola juga dapat membuat wadah untuk menampung aspirasi jemaat.

Bagi peneliti selanjutnya, untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan memilih informan dari masing-masing kategori jemaat dan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan atau pekerjaan jemaat.